

## Abstract

*The use of information technology is characterized by the emergence of various innovations, one of which is Institutional Level of Financial Application System (SAKTI) initiated by the Directorate General of Treasury. The innovation has been echoed for a long time and is planned to be applied to all agencies in Indonesia. In its implementation, SAKTI encountered several problems, including the delay in repeatedly implementing SAKTI, the lack of information from program owners and the level of understanding and knowledge about SAKTI at the user level which was still not optimal. This research attempts to understand the diffusion process of SAKTI application innovations carried out by the DG Treasury through the Regional Office of the Directorate General of Treasury D.I. Yogyakarta. Next also see how the process of adopting innovation at the Sleman KPP. By using the innovation diffusion theory from Rogers (2003), the concepts of the diffusion element of innovation and the stages of the innovation decision process are presented to get an overview of the SAKTI innovation diffusion and adoption process at the KPP Sleman. The method in this study is a case study with a descriptive approach by analyzing data from Miles and Huberman. The results of this study indicate that SAKTI is needed in financial management at KPP Sleman. Spread through various communication channels with assistance as a key to the successful implementation carried out by trainers. Diffusion acceleration is supported by a homophily nature between change agents and adopters and supporting external and internal environments. Even so, there are still problems in the innovation, communication channels and skills of trainers. In the adoption process, the benefits of adopter practice are more dominant than in terms of economic benefits. Innovation decisions are authority because they tend to be influenced by the role of the leader, while at the implementation stage there are still some procedures that are not in accordance with what should be done. Therefore, evaluation of the SAKTI program needs to be carried out by the DG Treasury, especially in relation to its own innovations, training processes, trainer competencies, and communication media used.*

**Keywords:** *diffusion, innovation, adoption of innovation, diffusion theory of innovation, information technology*

## Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi ditandai dengan munculnya bermacam inovasi, salah satunya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang diinisiasi oleh Ditjen Perbendaharaan. Inovasi tersebut telah digaungkan sejak lama dan direncanakan akan diterapkan pada seluruh instansi di Indonesia. Dalam implementasinya SAKTI ditemui beberapa permasalahan diantaranya adalah penundaan waktu implementasi SAKTI yang berulang kali, minimnya informasi dari pemilik program serta tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang SAKTI di level pengguna yang masih belum optimal. Penelitian ini mencoba memahami proses difusi inovasi aplikasi SAKTI yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta. Selanjutnya juga melihat bagaimana proses adopsi inovasi di KPP Sleman. Dengan menggunakan teori difusi inovasi dari Rogers (2003), konsep-konsep dari elemen difusi inovasi dan tahapan proses keputusan inovasi disajikan untuk mendapatkan gambaran proses difusi dan adopsi inovasi SAKTI di KPP Sleman. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif dengan analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SAKTI dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan di KPP Sleman yang penyebarannya melalui berbagai macam saluran komunikasi dengan pendampingan sebagai kunci keberhasilan implementasi yang dilakukan oleh para *trainer*. Percepatan difusi didukung dengan sifat *homophily* antara agen perubahan dan adopter serta lingkungan eksternal dan internal yang mendukung. Kendati begitu, masih ditemui beberapa persoalan pada inovasinya, saluran komunikasi serta kecakapan *trainer*. Pada proses adopsi, keuntungan dari sisi praktek dirasakan adopter lebih dominan ketimbang dari sisi keuntungan ekonomis. Keputusan inovasi bersifat otoritas karena cenderung dipengaruhi oleh peran pimpinan, sedangkan pada tahap implementasi masih ditemui beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu, evaluasi atas program SAKTI perlu dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan terutama dalam kaitannya dengan inovasinya sendiri, proses pelatihan, kompetensi *trainer*, dan media komunikasi yang digunakan.

**Kata Kunci:** difusi, inovasi, adopsi inovasi, teori difusi inovasi, teknologi informasi